

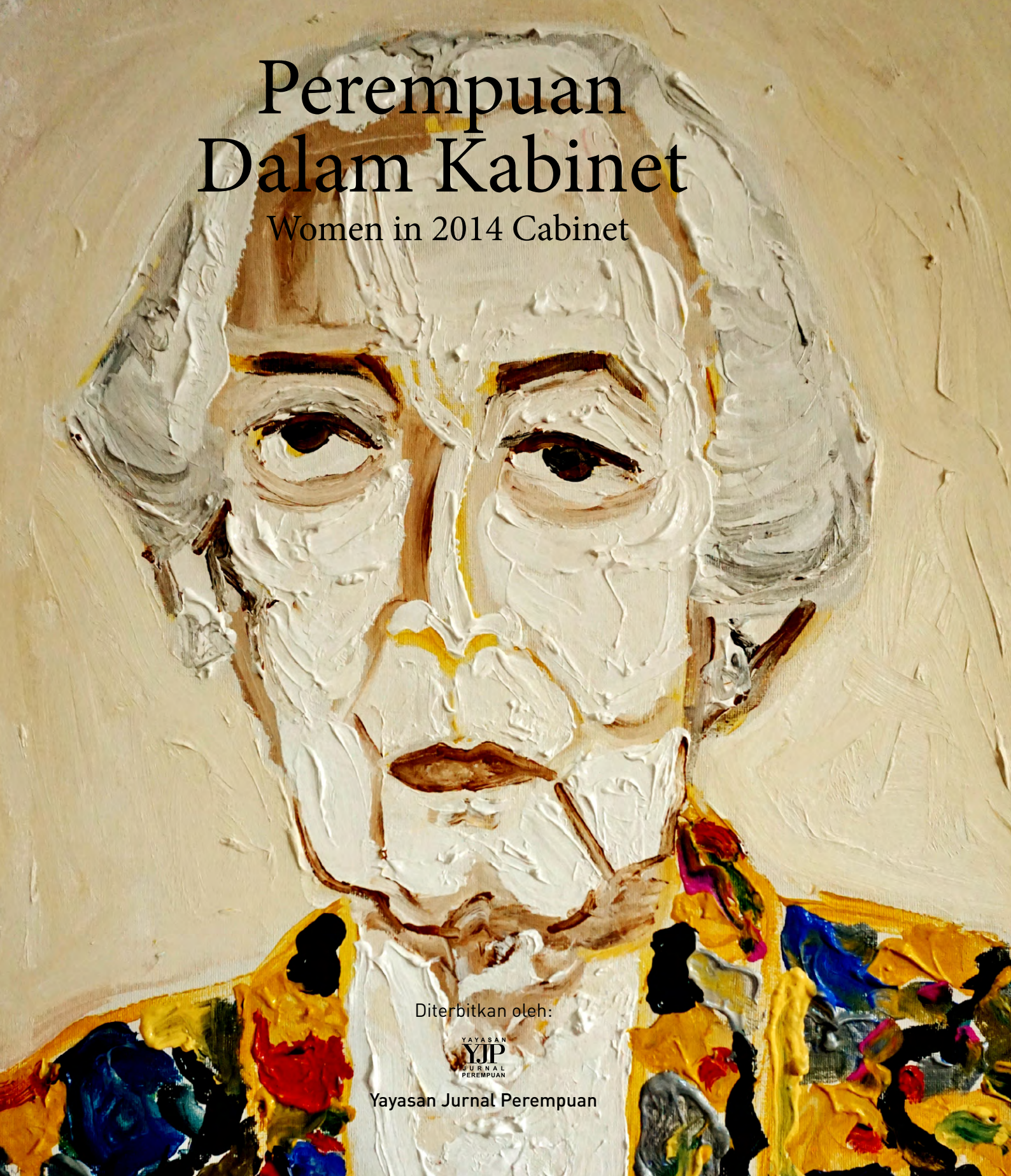
Perempuan Dalam Kabinet

Women in 2014 Cabinet

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

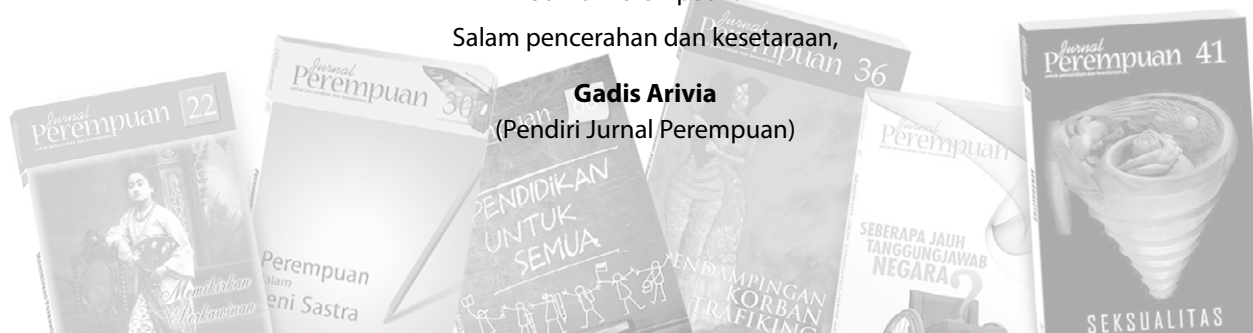
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics* 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics* 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'etre of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance* 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings

333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

“Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan”

Sirimavo Bandaranaike terpilih menjadi perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri di Sri Lanka di tahun 1960. Sejak saat itu kurang dari 80 perempuan dari belahan dunia lain mencapai posisi eksekutif baik sebagai menteri, perdana menteri atau presiden. Di tahun 1990 setidaknya ada 26 perempuan yang menduduki posisi eksekutif dalam kabinet-kabinet negara-negara di dunia, yang kemudian angkanya naik menjadi 37 perempuan di tahun 2000—yaitu mengalami kenaikan tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60-an, 70-an, dan 80-an (UNDP, *Gender Leadership in Executive Report*, 2013). Meskipun demikian masih banyak negara yang harus bekerja keras untuk meruntuhkan “atap kaca” (kerap disebut sebagai *glass ceiling*). Atap kaca benar-benar pecah di Finlandia dimana tiga perempuan berada dalam pucuk pemimpin eksekutif. Jumlah perempuan dalam parlemen Denmark adalah 49 persen tercatat di akhir tahun 2013, demikian juga Swedia sejumlah 42 persen, angka yang sangat tinggi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit retak di Inggris, dengan Margaret Thatcher menjadi contoh perdana menteri perempuan terkuat di jamannya. Dan atap kaca masih benar-benar utuh, dan tak pecah, karena Hillary Clinton gagal menjadi Presiden di Amerika. Kajian *Jurnal Perempuan* 83 kali ini akan mengevaluasi kembali sistem politik, sistem pemerintahan, stereotip perempuan pemimpin, dan pemahaman atas karakteristik dan kepribadian pemimpin dari kaca mata ilmuwan politik, pemerintahan dan sosiolog dalam sumur paradigma filsafat feminisme.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensialis menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsek dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, dalam

konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu **pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan**. Kajian ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Wajah kabinet baru Indonesia tahun 2014-2019 akan dikaji secara lebih spesifik dari perspektif individual dengan memperhatikan konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Tata kelola pemerintahan yang mempromosikan kesetaraan gender menyadari perbedaan karakteristik ini dan tidak memaksakan generalisasi dalam pandangan filosofisnya. Dunia mencatat bahwa perempuan dapat lebih mudah menguasai level parlemen daripada level eksekutif. Padahal level kepresidenan memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih independen dalam sistem kekuasaan daripada sistem parlementer. Dalam buku terbaru karya Farida Jalalzai berjudul *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* (Oxford University Press, 2013), dia menemukan lebih dari 300 perempuan dunia telah menjalankan tugas-tugas eksekutif dan hanya 21 perempuan yang mampu menduduki posisi tertinggi. Kajian ini juga mengungkap hanya 16 perempuan yang bisa mencapai posisi kepresidenan. Dari angka ini masih banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau klan keluarganya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan naik dalam posisi

kekuasaan kenegaraan, tetapi perempuan dapat menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil dimana perempuan memiliki hubungan darah dengan oligarki kekuasaan rezim tertentu. Meskipun ini merugikan perempuan, tetapi paling tidak perempuan mendapatkan pengalaman-pengalamannya yang berbeda dari sebelumnya dimana perempuan merupakan lawan-inferior yang tidak berpengalaman sama sekali dalam hal politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Dalam bukunya Jalalzai menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki, dimana laki-laki mempertahankan kontrol dan kekuasaan (2013: 43). Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan dalam eksekutif lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk "siapa saja" karena sifatnya yang kontekstual.

Beberapa kajian sebelumnya mewartakan bahwa banyak kepemimpinan perempuan dalam posisi eksekutif baik level nasional, provinsi dan kabupaten merupakan kabar gembira, karena menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih perempuan pemimpin. Indonesia mencatat Walikota Surabaya Risma, Bupati Kebumen Rustri, meskipun juga mencatat kegagalan terbesar Gubernur Banten Ratu Atut yang terjerat kasus mega korupsi demikian juga Bupati Karanganyar Rina Iriani. Partisipasi politik dan kenegaraan perempuan sebagaimana laki-laki juga mengalami naik-turunnya. Catatan-catatan korupsi juga menjadi pekerjaan tersendiri dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam lingkup eksekutif. Kajian menunjukkan bahwa perempuan

harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif, tidak hanya latar belakang pendidikan, lingkaran keluarga, pengaruh keluarga, dan lain-lain, tetapi juga harus berjuang melawan segala "prasangka" bahwa perempuan tidak memiliki "kemampuan asal" (kerap disebut takdir) dalam memimpin. Asia dan Amerika Latin adalah rumah dimana tradisi atas perempuan yang tidak memimpin ini dipelihara. Hubungan darah, situasi tidak stabil, dan transisi demokrasi dalam banyak kasus telah menolong perempuan memasuki tangga paling puncak kekuasaan eksekutif—sebagai janda perdana menteri atau sebagai anak perempuan seorang presiden yang terbunuh, misalnya, kemudian perempuan duduk dalam kursi kekuasaan, kemudian mengenal secara tak sengaja tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan betapa lemahnya perempuan yang menjadi pemimpin berasal dari akar organik, karena dia memang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin. Bahkan juga dipercayai, bahwa meskipun perempuan memimpin, dia selalu tak dipercaya akan berhasil memimpin. *Jurnal Perempuan* 83 edisi *Status Perempuan dalam Kabinet* ini akan meneliti dan mengulas bagaimana menjelaskan mekanisme politik bagi perempuan untuk dapat mencapai jaring dalam habitus tata kelola pemerintahan, baik secara filosofis, kesejarahan, paradigmatik dan praktis, terutama bagi politisi perempuan rentan yang berasal dari keluarga tidak stabil secara ekonomi-politik dan tidak masuk dalam lingkaran oligarki politik tertentu atau dapat kita sebut sebagai "politisi perempuan organik". Negara dan partai politik bertanggung-jawab atas para perempuan aktivis politik brilian tersebut dengan kehendak-kehendak politiknya, baik formal via kebijakan dan informal via praktik budaya politik. (Dewi Candraningrum, *Pemimpin Redaksi*).

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Philips J. Vermonte. Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS. Jl. Tanah Abang III No. 23-27

Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Political Engineering for Women in Indonesian Governance

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 257-264, 7 gambar, 3 tabel, 11 daftar pustaka.

The rising number of women in parliament is a vital entry point to involve more women politics. This factor opens discourse, engagement and active participation that can elevate women's political bargain in negotiation room. It is in the long run will affect the embodiment of critical mass which is believed to increase factor of women's representation in policies decision. Mainstreaming gender in governance shall be supported by political engineering, institutional setting, roles of the game, and an open and democratic system. Democratic political setting is the pre-requisite to create equal representation and participation for women and other minorities group in governance politics.

Keywords: women, politics engineering, critical mass, governance.

Peningkatan persentase perempuan dalam parlemen adalah *entry point* bagi keterlibatan yang lebih aktif dan konkrit bagi kelompok perempuan secara keseluruhan. Peningkatan ini akan membuka ruang diskursus dan menguatnya posisi tawar kepentingan kelompok perempuan dengan membentuk *critical mass* yang diyakini penting untuk bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Faktor kultural penting dalam mempengaruhi *politics of presence* dari kelompok perempuan. Perihal pengarusutamaan gender dalam tata kelola ini harus didukung dengan *setting* kelembagaan, yang berwujud pada aturan main, *institutional engineering* dan pembuatan serta penjaminan atas aturan main politik yang lebih terbuka dan demokratis. Setting politik demokratis adalah prasyarat terciptanya representasi dan partisipasi kelompok perempuan secara kuantitatif dan substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: perempuan, rekayasa politik, massa kritis, tata kelola.

Mariana Amiruddin. Komisioner Komnas Perempuan. Jl. Lathuhary No.4B, Menteng, Jakarta 10310. Telp.: (021) 3903963

Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi

Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 265-270, 1 tabel, 3 daftar pustaka.

Indonesia urgently needs national women's machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conferenc of women in September 1995 giving specific attention to national women's machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women's machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women's machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fulfill the mandates.

Keywords: national women's machinery, women ministry, commission for

women.

Indonesia masih membutuhkan "*National Women's Machinery*"— seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya "mesin nasional" dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran "mesin nasional" sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar "mesin nasional" ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka.

Kata Kunci: mesin nasional, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan.

Ryan Sugiarto. Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada . Jl. Sosio Humaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281. Telp. +62 274 550435

Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern

Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 271-277, 12 daftar pustaka.

Genealogy and history of queens in Nusantara had been written in golden ink. Their histories across Nusantara were not only an accumulation of wives or ruler, but also inhibited the magic-realism of modern Indonesian society. However, the minimum or rare documents of Nusantara's women leadership had blurred their real representation and strong leadership. This paper investigates the history, roles, status and profiles of women's leader. This paper aims to support current political situation specifically on the tradition of writing woman's her-stories. From this perspective legitimacy of power from history are taken to support women's leadership in current modern Indonesia state.

Keywords: queen, Nusantara, myth, state.

Sejarah panjang kekuasaan dan kepemimpinan perempuan nusantara mencatat hasil yang gemilang. Sejarah perempuan penguasa tidak hanya menempatkan dirinya sebagai ratu atau penguasa kerajaan, tetapi juga memenuhi ruang kesadaran magis masyarakat melalui mitos. Namun minimnya literasi mengenai peran dan sejarah kuasa perempuan yang ditulis oleh sejarawan, membuat bangsa ini seolah tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan ini bermaksud mengkaji kuasa perempuan nusantara dan sejarah kekuasaan perempuan Indonesia yang berlangsung berabad silam dan mitos yang hidup hingga saat ini. Tulisan ini diharapkan mampu memberi ruang untuk menengahkan pengalaman perempuan nusantara memimpin negeri. Sekaligus mendorong kemungkinan penulisan sejarah yang berpihak pada perempuan. Sehingga sebagai sebuah bangsa, memiliki kajian yang berpijak pada khasanah perempuan nusantara untuk memberi dasar pada kekuatan politik perempuan hari ini.

Kata kunci: ratu, Nusantara, mitos, negara.

Triyono Lukmantoro. Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang. (Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang), Semarang, Jawa Tengah 50275. Telepon:+62 24 8414513

Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja

Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 279-287, 25 daftar pustaka.

Media representations of women who have positions as ministers in President Joko Widodo's Kabinet Kerja become phenomenon. On one side, media exposes aspects of successful side of female ministers. Media cited the statement of Presiden Jokowi that there are two "first woman" as appreciation. But, on the other side, media representations have masculinity character. For female minister who has "unique body performance", the exposure of media are so excessive. Media had been trapped in the calculation of news values as reference for gathering news. The news values have been controlled by masculinity discourse that legitimate patriarchal regime of truth.

Keywords: media, representations, woman, masculinity.

Representasi media terhadap kehadiran perempuan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi fenomena tersendiri. Media banyak menyoroti sisi keberhasilan kalangan perempuan menteri. Media mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada dua "Perempuan Pertama" untuk memberi apresiasi. Namun, pada sisi yang lain, representasi media menunjukkan watak maskulinitas. Untuk perempuan menteri tertentu yang dianggap memiliki "penampilan tubuh yang unik", maka media memberikan sorotan yang berlebihan. Di sinilah media terjebak dalam nilai berita yang menjadi acuannya sendiri. Padahal nilai berita itu sudah dikontrol oleh wacana maskulinitas yang membenarkan rezim kebenaran patriarki.

Kata kunci: media, representasi, perempuan, maskulinitas

Kurniawati Hastuti Dewi. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Telp.(021) 5225711, 5251542

Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 289-306, 4 tabel, 44 daftar pustaka.

This paper shows that the role and position of Indonesian women in local governance are improving gradually since the implementation of direct elections in 2005. The "structural opportunities" for women to be elected as local leader have increased under the direct elections. The number of women elected as local leaders has risen significantly during 2005-2014 periods. Female local leaders' profiles are diverse in terms of their socio-political background, individual capital and political parties, reflecting a new typology of female local leaders. The presence of female local leaders does not necessarily mean that they always advocate for women issues in their policy line, as this ideal condition depends on other influential factors. And yet, this paper suggests the declining trend of participation and opportunities of women in local governance as the new Local Government Act No. 23/2014 adopts the election of local government head via the Regional People's Representative Council to replace the earlier mechanism of direct election.

Keywords: women, governance, local direct election.

Tulisan ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia semakin membaik sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005. Pilkada langsung telah menyediakan "struktur kesempatan" yang lebih besar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin politik di daerah. Jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah meningkat signifikan selama kurun waktu 2005-2014. Profil perempuan pemimpin daerah lebih beragam dari segi latar belakang sosial-politik, modal individu, dan partai pengusung yang memperlihatkan kemunculan tipe-tipe baru perempuan pemimpin daerah. Keberadaan perempuan pemimpin daerah tidak serta merta menjamin kinerja dan pemihakan terhadap berbagai persoalan perempuan di daerah, karena hal ini tergantung pada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun demikian, tulisan ini juga menengarai tren kemunduran peluang dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diberlakukannya kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23/2014.

Kata Kunci: perempuan, tata kelola pemerintahan, Pilkada langsung (Pemilihan Kepala Daerah).

Robert Endi Jaweng. Direktur Eksekutif KPPD, Jakarta. Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980. Telp.: (62-21) 8378 0642/53

Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 307-315, 3 tabel, 12 daftar pustaka.

Decentralization and local autonomy marks the shift of power from centre to the locals. In the political transition landscape, the actual cause in Indonesia is the power relations that should investigate further dimension of gender, social, politics, and economy. Within this network and framework, women's leadership are hoped to nurture equality and prosperity for those being othered by development and growth. This paper concludes that executive leadership that promotes gender equality shall, foremost, promote concept of women's leadership which are not only due to inheritance but basic political infrastructure.

Keywords: decentralization, bureaucracy, female local leaders.

Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekadar menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang relasi kuasa (*power-relations*) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. Hanya pada struktur demikian, kepemimpinan perempuan menjadi lebih bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh perempuan di berbagai pelosok negeri untuk mengambil peran historis di daerah. Artikel ini bertolak dari proposisi dasar: meski hari ini muncul sederet tokoh perempuan memegang tampuk kepemimpinan eksekutif, namun mereka belum sepenuhnya melahirkan dan atau dilahirkan dalam ruang transformasi struktural dan tata relasi kuasa yang berubah.

Kata Kunci: desentralisasi, birokrasi, kepala daerah perempuan.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi *Jurnal Perempuan*.
Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,
12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

***Raison d'être* Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet
Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola
Pemerintahan**

***Raison d'être* of Mainstreaming Gender in 2014-2019
Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 317-326, 2 gambar,
18 daftar pustaka.

This research focuses on the presence of women in the Executive via institutionalism approach that methodologically realize that women's position in public is critically under-represented. Approach being employed is defending women and other minorities groups. This approach assume: 1) existential reason of politics is too masculine and unequally distributed among groups; 2) appreciating informal practice held by minorities groups; 3) committed to mainstreaming equality in supporting groups such as women, diffable groups, LGBT, and ecological justice.

Keywords: Executive, women, minorities, governance.

Kajian ini meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet dengan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktek yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktek politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (!)iyian dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktek-praktek informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini secara spesifik menginduk pada praktek-praktek masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain.

Kata kunci: Eksekutif, perempuan, minoritas, tata kelola.

Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics

Robert Endi Jaweng

Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta
Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
endi_jaweng@yahoo.com

Naskah Diterima 23 Agustus 2014. Direvisi 12 September 2014. Disetujui: 30 September 2014

Abstract

Dezentralization and local autonomy marks the shift of power from centre to the locals. In the political transition landscape, the actual cause in Indonesia is the power relations that should investigate further dimension of gender, social, politics, and economy. Within this network and framework, women's leadership are hoped to nurture equality and prosperity for those being othered by development and growth. This paper concludes that executive leadership that promotes gender equality shall, foremost, promote concept of women's leadership which are not only due to inheritance but basic political infrastructure.

Keywords: decentralization, bureaucracy, female local leaders.

Abstrak

Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekedar menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang relasi kuasa (*power-relations*) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. Hanya pada struktur demikian, kepemimpinan perempuan menjadi lebih bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh perempuan di berbagai pelosok negeri untuk mengambil peran historis di daerah. Artikel ini bertolak dari proposisi dasar: meski hari ini muncul sederet tokoh perempuan memegang tampuk kepemimpinan eksekutif, namun mereka belum sepenuhnya melahirkan dan atau dilahirkan dalam ruang transformasi struktural dan tata relasi kuasa yang berubah.

Kata Kunci: desentralisasi, birokrasi, kepala daerah perempuan.

Pendahuluan

Pilihan berotonomi dan menyelenggarakan pemerintahan desentralistis di Indonesia sejak awal tahun 2001 lalu tentu bukan semata mengikuti tren demokratisasi (gelombang ketiga) yang mengarus deras di banyak negara-negara berkembang belakangan ini tetapi juga sebagai pilihan sadar untuk merespons situasi krisis yang lahir dari warisan struktur ekonomi-politik lama dan sadar akan tantangan perubahan masa depan terkait tata kelola negara-bangsa modern. Kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan di masa Orde Baru dengan ciri pemapanan strukturalnya yang membuat segala

proyek perubahan menuju tatanan lokal yang demokratis dan adil selalu menempuh jalan panjang. Lahirnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 diyakini sebagai rute alternatif secara kebijakan guna meretas jalan baru menuju tata kelola sektor publik lokal yang berkeadilan. Ide kesetaraan warga—baik secara sosial, kelas dan gender yang lebih merupakan produksi suatu konstruksi sosial diskriminatif—hendak diubah melalui instrumen kebijakan dengan membuka struktur kesempatan bagi siapa pun yang mengakses sumber daya dan posisi pengaruh dalam kehidupan publik.

Termasuk dalam arus perubahan yang diusung dalam kerangka regulasi yang ada adalah kesempatan bagi perempuan untuk mengakses posisi politik untuk menentukan tidak saja dalam birokrasi dan legislatif tetapi juga terutama dalam formasi eksekutif [Wakil Kepala Daerah, bahkan Kepala Daerah]¹. Hingga kedua *beleid* tersebut berganti menjadi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004, serta perubahan terbaru berupa UU No.23/2014, praktik tata kelola sektor publik dan akses kekuasaan lokal memang menyiratkan hadirnya lingkungan dan suasana yang relatif berubah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kehidupan publik non-diskriminatif dan kemunculan perempuan dalam tampuk kekuasaan eksekutif mulai metampakkan bayangan awal. Namun, dengan tetap mencatat semua gerak maju yang berhasil ditempuh sejauh ini, perubahan substantif dan dampak pengaruh dalam skala berarti jelas masih jauh panggang dari api. Artikel ini hendak mendeskripsi gambaran masalah maupun capaian yang ada, serta mendiskusikan latar sebab dan faktor suportif dibaliknya. Pada catatan akhir akan ditegaskan ulang isu pokok yang dipandang krusial guna memperkuat kepemimpinan perempuan dan agenda perwujudan keadilan gender di daerah.

Bagaimana Integritas Perempuan Kepala Daerah?

Meski terbatas, dan boleh jadi merupakan kasus tunggal, kemunculan pemimpin perempuan di tingkat lokal mendahului kemunculan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden perempuan pertama dalam kepemimpinan eksekutif nasional, bahkan terjadi sebelum reformasi-desentralisasi. Suryatati A. Manan, birokrat karier *cum* politisi perempuan dari Pulau Bintan-Kepulauan Riau (Kepri), mulai memegang tampuk kepemimpinan eksekutif sebagai Walikota Tanjungpinang pada tahun 2006 hingga 2010. Ketika era desentralisasi datang menggantikan sistem politik otokrasi-sentralistik Orba, kota administratif tersebut turut bersalin status menjadi

daerah [kota] otonom berdasarkan UU No.5 Tahun 2001. Suryatati diangkat sebagai Pejabat Walikota (2001-2002) untuk selanjutnya dipilih DPRD sebagai Walikota Periode I (2002-2007) dan tahun 2007 dipilih langsung oleh rakyat untuk Periode II jabatan 2007-2012. Sayangnya, di ujung masa pengabdian panjang dan strategis tersebut, penulis buku kumpulan puisi "Perempuan Walikota" ini tersangkut masalah hukum berupa [dugaan] tindak pidana korupsi atas anggaran sewa/pemeliharaan rumah dinas, meski uang sebesar Rp 2,5 Miliar yang diduga hasil korupsi tersebut sudah dikembalikan ke pihak Kejaksaan Tinggi Kepri.

Dalam daftar lengkap, kemunculan perempuan dalam formasi kepemimpinan eksekutif lokal [Wakil Kepala Daerah/Wakepda dan terutama Kepala Daerah] menampilkan gambaran bervariasi. Pada level propinsi, terdapat dua nama pemimpin perempuan yang pernah memegang posisi kunci, namun hari ini kita tidak lagi memiliki nama lain dalam posisi sedang menjabat [petahana]. Sebaran jumlah yang lebih banyak terlihat pada daftar pemimpin di level kabupaten maupun kota, terutama dalam posisi kepemimpinan puncak [orang nomor 1] di daerah bersangkutan.

Tabel 1: Pemimpin Perempuan di Level Propinsi

No.	Nama	Daerah	Jabatan	Periode/Masa Bakti
1.	Ratu Atut Chosiyah	Banten	Gubernur	Periode I [2007-2012] dan Periode II (2012-2014). Sebelumnya menjadi Wakil Gubernur Periode 2002-2005, serta dilanjutkan sebagai Plt. Gubernur 2005-2007.
2.	Rustri-ningsih	Jawa Tengah	Wakil Gubernur	Periode: 2008-2013. Sebelumnya menjadi Bupati Kebumen [Periode I: 2000-2005 & II: 2005-2008]

Tabel 2: Pemimpin Perempuan di Level Kabupaten

No.	Nama	Daerah	Jabatan	Periode/Masa Bakti
1.	Anna Sophanah	Indramayu, Jawa Barat	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
2.	Cellica Nurrachdiana	Karawang, Jabar	Wakil Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
3.	Neneng Hasanah Yasin	Bekasi, Jawa Barat	Bupati	2012-sekarang [Periode I hingga 2017]
4.	Rina Iriana Sri Ratnaningsih	Karanganyar, Jawa Tengah	Bupati	Tidak lagi menjabat: 2003-2008 [Periode I], 2008-2013 [Periode II]
5.	Sri Suryawidati	Bantul, DI Yogyakarta	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
6.	Ni Putu Eka Wiryastuti	Tabanan, Bali	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
7.	Juliarti Djuhardi Alwi	Sambas, Kalbar	Bupati	2011-sekarang [Periode I hingga 2016]. Sebelumnya berposisi sebagai Wakil Bupati, periode 2006-2011.
8.	Indah Putri Indriani	Luwu Utara, Sulsel	Wakil Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
9.	Widya Kandi Susanti	Kendal, Jateng	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
10.	Christiany Euginia Paruntu	Minahasa Selatan, Sulut	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
11.	Idza Priyanti	Brebes, Jateng	Bupati	2012-sekarang [Periode I hingga 2017]. Sebelumnya berposisi sebagai Wakil Bupati, periode 2011-2012.
12.	Rita Widyasari	Kutai Kertangera Kaltim	Bupati	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]

Tabel 3: Pemimpin Perempuan di Level Kota

No.	Nama	Daerah	Jabatan	Periode/Masa Bakti
1.	Ade Uu Sukaesih	Banjar, Jabar	Walikota	2013-sekarang [Periode I hingga 2018]
2.	Airin Rachmi Diany	Tengerang Selatan, Banten	Walikota	2011-sekarang [Periode I hingga 2015]
3.	Atty Suharti Tochija	Cimahi, Jabar	Walikota	2012-sekarang [Periode I hingga 2017]
4.	Ida Fitriati Basjuni	Pagar Alam	Walikota	2013-sekarang [Periode I hingga 2018]
5.	Illiza Sa'aduddin Jamal	Banda Aceh, Aceh	Walikota	2014-sekarang [Periode I hingga 2017], sebagai pengganti Walikota Mawardy Nurdin di mana Illiza berpasangan sebagai Wakil Walikota [Periode I: 2007-2012, Periode II: 2012- 2014]
6.	Rukmini Buchari	Probolingo, Jatim	Walikota	2013-sekarang [Periode I hingga 2018]
7.	Sylviana Murni	Jakarta Pusat	Walikota	Tidak lagi menjabat [berakhir 2011]. Walikota Administratif: jabatan birokrasi berdasar pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta.
8.	Siti Mashito Soeparno	Tegal, Jateng	Walikota	2014-sekarang [Periode I hingga 2019]

9.	Suryatati A.Manan	Tanjung-pinang, Kepri	Walikota	Tidak lagi menjabat [berakhir 2012]. Pejabat Walikota [2001-2002], Walikota yang dipilih DPRD [Periode I: 2002-2007] dan dipilih langsung oleh rakyat [Periode II: 2007-2012].
10.	Tri Rismaharini	Surabaya, Jatim	Walikota	2010-sekarang [Periode I hingga 2015]
11.	Tatong Masloman Bara	Brebes, Mobagu	Walikota	2013-sekarang [Periode I hingga 2018]

Menelusik latar/sejarah karier maupun proses kemunculan mereka di pentas kepemimpinan lokal maka sketsa profil politik berikut dapat dianggap sebagai tipologi yang umumnya kita peroleh. Pertama, kecuali Suryatati di Tanjungpinang, semua pemimpin perempuan dalam pranata eksekutif muncul seiring pelaksanaan otonomi. Terlepas dari kebermasalahan desentralisasi pada dimensinya yang lain, fenomena ini jelas merupakan satu kabar baik otonomi kita. Sejatinya, medan daerah bisa menjadi *training ground* dan “rahim” baru: sumber kepemimpinan dengan membuka akses munculnya tokoh perempuan yang di era sebelumnya seolah musykil menjadi Bupati, Walikota, apalagi Gubernur. Menariknya, mereka tak langsung muncul begitu implementasi otonomi dimulai pada awal 2000. Selain Rustriningsih yang menjadi Bupati Kebumen pada 2001, Rina Iriana sebagai Bupati Karanganyar sejak 2003, dan Ratu Atut berposisi sebagai Wakil Gubernur Banten tahun 2002, sebagian besar Kepala/Wakil Kepala Daerah perempuan lahir setelah sedasawarsa kita berotonomi.

Pertama, kemunculan yang terbilang “lambat” ini menunjukkan proses belajar yang menempuh waktu cukup panjang bagi perempuan untuk maju memimpin pemerintahan, khususnya jika targetnya adalah posisi puncak [nomor 1] di daerahnya. Mereka membutuhkan waktu untuk meyakinkan diri, meraih dukungan elit politik dan berinvestasi kepercayaan rakyat pemilih. Apalagi jika dilihat dari profil lain, yakni usia ketika mulai memimpin, secara umum pemimpin perempuan identik dengan pemimpin muda hingga berusia paruh baya. Berbeda dengan posisi sebagai wakil rakyat dalam pranata legislatif yang sering tak memerlukan persiapan ekstra-keras, jabatan eksekutif memang membutuhkan latihan/persiapan panjang dan kematangan pribadi yang cukup memadai. Tuntutan demikian kiranya bisa dipahami lantaran terutama di tangan seorang Kepala/Wakil Kepala Daerah sesungguhnya nasib kemajuan suatu daerah dipertaruhkan.

Kedua, proses perempuan menjadi pemimpin puncak tak selalu mengambil jalan “langsung”,

namun pada umumnya melalui jalur “antara”, dengan terlebih dahulu menjadi Wakepda, anggota DPRD atau jabatan-jabatan strategis lainnya. Tidak semua yang pernah menjadi Wakepda kemudian naik kelas menjadi Kepda (kasus Wagub Jateng Rustriningsih), sementara pada sisi lain tampaknya tak begitu jelas apakah ada desain khusus ihwal strategi kaderisasi seorang Wakpeda perempuan menuju kursi Kepda. Terlepas dari ada-tidaknya perencanaan/skenario dalam karier politiknya, sebagian besar pemimpin perempuan memang memilih posisi skunder [Wakepda] sebelum periode berikutnya menjadi orang nomor 1, termasuk melalui status sebagai “pengganti” yang melanjutkan masa bakti Kepda yang berhenti ditengah jalan karena berbagai alasan.

Ketiga, lebih dari kesiapan diri [pendidikan, kompetensi, dll], tampaknya *endowment-factor* berupa hubungan darah atau ikatan perkawinan membuat sebagian Kepda/Wakepda perempuan bisa menduduki posisinya. Sirkulasi kekuasaan lokal yang tertutup dalam lingkaran dinasti dan jejaring kekerabatan membawa keuntungan tersendiri bagi sebagian besar para pemimpin perempuan [kecuali Tri Rismaharini di Surabaya, Sylviana Murni di Jakarta Pusat, Rina Iriana di Karanganyar serta Rustriningsih di Kebumen/Jateng]. Dari analisis profil politik, sejumlah pemimpin tersebut memang tidak hanya menjadi istri, anak atau adik petahana yang semuanya laki-laki, tapi juga terlibat dalam kepengurusan organisasi politik/profesi dan menekuni berbagai karier profesional. Namun, meski tak mutlak, tetap saja sulit disimpulkan bahwa kesemua faktor tersebut bisa membawa mereka ke kursi pemimpin daerah jika tak memiliki hubungan darah/perkawinan dengan “*strong man*” yang sebelumnya memimpin dan/atau memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut.

Profil politik demikian mungkin tak terlalu menjadi soal kalau dari sisi kinerja saat menjabat berhasil menunjukkan suatu “pembuktian kompetensi kepemimpinan” yang mumpuni. Sayangnya, sebagai bagian dari desain awal, keberadaan pemimpin

perempuan dari lingkaran dinasti tersebut tampaknya tak murni berlandas niat memajukan daerah tapi lebih untuk merawat warisan program petahana seraya mengamankan kepentingan ekonomi-politiknya. Di sini, ruang pembuktian diri, apalagi bereksperimen dengan aneka inovasi dan program spektakuler, menjadi suatu yang terasa sulit dibayangkan. Agenda penguatan perempuan sendiri dan program yang erat identifikasinya dengan karakter seorang perempuan [kesehatan, pendidikan, program sosial, ekonomi mikro] tak tampak menonjol. Lebih jauh, lantaran misinya tak berangkat dari agenda perjuangan perempuan, jelas saja sulit berharap kepada para pemimpin perempuan tersebut untuk menyiapkan para kader perempuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pada periode-periode sesudahnya². Pasangan kembar dari profil buram di atas adalah gambaran program/kinerja para pemimpin perempuan yang—selain terbilang gemilang pada sejumlah kasus terbatas—juga acap mendapatkan sorotan tersendiri. Variasi capaian secara umum dapat diringkas pada poin-poin berikut.

Pertama, sejumlah Kepda secara nyata berhasil membangun daerahnya, bahkan mencapai level inovasi dan terobosan signifikan. Rustriningsih, saat memimpin Kebumen, dapat dicatat pada urutan awal yang dinilai sukses memimpin reformasi pelayanan publik [terutama kesehatan dan pendidikan], reformasi tata kelola [transparansi informasi lewat Media Center, radio dan Ratih-TV dengan rubrik favorit “Selamat Pagi Bupati”], pembangunan infrastruktur strategis bagi mobilitas warga dan komoditi dari berbagai sentra produksi. Terpilihnya Rustriningsih pada periode kedua, bahkan “naik kelas” ke Jateng sebagai Wagub, mencerminkan kepuasan dan kepercayaan rakyat atas sukses kepemimpinannya.

Program/kinerja gemilang dan paling aktual hari ini datang dari Surabaya. Trismaharini telah melampaui jauh di atas rata-rata kinerja Kepda—entah laki-laki atau perempuan—pada umumnya. Membangun jalur karier sebagai birokrat tulen, Walikota Risma langsung menyabet 6 penghargaan nasional/internasional pada tahun kerja pertama (2010), terus meningkat tahun-tahun selanjutnya dan mencapai 24 penghargaan tahun 2013. Risma sukses membuktikan adagium “kepemimpinan yang paling dipercaya rakyat adalah keteladanan” dan menghadirkan “pemerintahan yang bekerja” sepanjang empat tahun terakhir. Risma menebar tuah pengaruh dengan menggerakkan semua elemen warga

kota melalui reformasi tata kelola dan anggaran [*e-procurement*, *e-budgetting*, *e-licensing/SSW*], pelayanan dasar dan ekonomi rakyat, tata kota (taman dan ruang publik, bebas reklame besar, dll).

Box 1: Kepemimpinan Berbasis Keutamaan Nan Menggerakkan Trismaharini

Walikota Surabaya Trismaharini [Risma]: pembukti terbaik bahwa ikhtiar membangun sosok kepemimpinan berdaya pengaruh kuat di era otonomi ini pertama-tama berarti membangun fondasi otentisitas diri yang dilapisi segala keutamaan moral bersih, amanah, merakyat, inspiratif dan bertauladan. Keutamaan yang otentik akan menjadi karakter, dan dalam sektor publik jelas “karakter adalah kekuasaan”—karakter tersebut menjadi inspirasi dan sumber kekuasaan yang mempengaruhi aparatur birokrasi dan potensial merebut hati rakyat. Dengan itu, sang pemimpin, pada tingkat lanjut, bisa membangun suatu kerangka perubahan lebih besar, yakni pemerintahan yang digerakan nilai, menumbuhkan *trust* publik (*public service is public trust*). Di sini, “kepemimpinan mesti selalu dimulai dari dalam hati, lalu memancar keluar sewaktu melayani mereka yang dipimpin” [Kenneth Blanchard].

Risma sadar: Kepemimpinan itu selalu tentang daya pengaruh nan menggerakkan. Elemennya bukan semata figur pemimpin, tetapi juga mereka yang dipimpin. Dalam koin sama ada sisi pengaruh yang dialirkan sang pemimpin, juga ada sisi *movement*, sekurangnya partisipasi, sebagai bentuk respons pengikut dalam lingkaran pengaruhnya. Sayangnya, karakter kepemimpinan birokratik yang lama dialami bangsa ini telah melupakan interaksi dinamis tersebut. Unsur *movement* nyaris hilang, daya gugah selalu dikerah melalui jalur keras rezimentasi dan manipulasi sistematis. Pada era otonomi ini, tantangan memperbarui sektor publik mensyaratkan kualitas kepemimpinan berdaya pengaruh (persuasif) nan menggerakkan (partisipatif) dalam satu tarikan nafas yang sama. Risma telah membuktikan ujaran dasar kepemimpinan tersebut.

Sumber: Disitir dari Robert Endi Jaweng, “Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah”, Penerbit Buku Kompas, 2014.

Kedua, pada gambaran lainnya, sebagian besar Kepda/Wakepda perempuan justru belum tercatat unjuk kinerja signifikan, lebih banyak menjalankan pemerintahan *business as usual*, atau masih pada tahap perencanaan/persiapan operasional awal mengingat usia jabatan masih pendek. Pada kelompok ini, jenis kegiatan biasanya tak berpola, normatif, dan sloganistik sehingga terkesan kehilangan fokus dan

tak terukur. Ujung dari semua model program demikian adalah tak kunjung membaiknya kualitas hidup (IPM), kesejahteraan, dan standar pelayanan [SPM] di daerah.

Tentu di antara sederet program tersebut muncul pula satu-dua diantaranya yang menonjol: Rina Iriana menginisiasi Program LARASATI [Pelayanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah] di Karanganyar, Sri Surya Widiati dengan POSDAYA [Pos Pemberdayaan Keluarga] di Bantul, atau pun sejumlah prestasi kebersihan kota sehingga memperoleh penghargaan Adipura [Ida Fitriati Basjuni di Kota Pagar Alam, Atty Suharti Tochija di Cimahi], dst. Berbagai capaian tersebut memang terbatas namun menjadi tanda bahwa terobosan yang terbatas juga muncul dari Kepda perempuan. Tantangannya kemudian adalah perihal replikasi contoh sukses terbatas tersebut secara luas ke sektor/bidang lainnya, serta memastikan keberlanjutan program tersebut pada masa-masa mendatang.

Ketiga, gambaran yang lebih lazim, program yang dikerjakan Kepda/Wakepda perempuan adalah warisan dari petahana sebelumnya, terutama jika pendahulunya adalah orang tua [Ni Putu Eka Wiryastuti di Tabanan], suami [Rukmini Buchori di Probolinggo, Widya Kandi di Kendal, Sri Surya Widiati di Bantul, Anna Sophanah di Indramayu, Atty Suharti Tochija di Cimahi, Ade Uu Sukaesih di Banjar, dll], atau program Kepda yang diganti di tengah jalan [Illiza Sa'aduddin Jamal di Banda Aceh]. Sebagian memang terkait masalah penyesuaian/persiapan di mana melanjutkan program pendahulunya untuk satu-dua tahun pertama. Modifikasi, bahkan perubahan, dilakukan setelah mereka "khatam" dengan proses adaptasi yang ada atau merasa telah meraih dukungan DPRD dan birokrasi.

Namun secara umum Kepda pada kategori ini nyaris tak mengintrodukir program baru alias hanya menjadi pemain "pengganti" dengan mempertahankan program yang sama [terutama Ade Uu Sukaesih di Banjar, Anna Sophanah di Indramayu, dan Sri Surya Widiati di Bantul]. Pada sebagian kasus malah melorot kualitas implementasi dan deliverinya kepada publik, sebagaimana yang hari ini banyak dikritik pengamat dan masyarakat sendiri. Kasus merosotnya mutu layanan perijinan [PTSP] di Cimahi yang pernah menjadi pionir di masa Walikota Itoc Tochija atau program modernisasi Desa di Bantul pada masa Bupati Idham Samawi adalah sebagian contoh yang cukup krusial saat ini. Derajat kapasitas

dan komitmen hingga orientasi kebijakan membuat capaian sebelumnya sulit dijaga, tetapi juga kesibukan mengamankan kepentingan ekonomi-politik dinasti ditengarai sebagai biang masalah yang tak kalah serius. Niat awal regenerasi dalam lingkaran dinasti memang tidak pernah sungguh-sungguh dimaksudkan untuk berbakti kepada kemaslahatan publik setempat.

Infrastruktur-Politik Perempuan Kepala Daerah

Tentu, perjuangan politik perempuan tak bisa dianggap selesai dengan menduduki sederet kursi kekuasaan atau berhasil mengakses lembaga-lembaga negara: keterwakilan dalam legislatif ataupun kepemimpinan dalam eksekutif. Pilihan *struggle from within* tersebut tetap harus dimaknai sebagai opsi model intervensi dan gerakan menuju suatu perubahan lebih besar: kesetaraan dan keadilan tatanan publik, termasuk dengan mendekonstruksi hegemoni patriarki dan pembebasan menuju persamaan struktur sosial-politik. Inilah suatu perjuangan eksistensi dan persamaan hak. Menimbang banyak urusan pemerintahan saat ini sudah diserahkan daerah, momentum untuk mendorong kebijakan kesetaraan gender dan keadilan sosial jelas terbuka luas. Perempuan berada pada panggilan kesejarahan untuk mengisi dan mengkapitalisasi momentum tersebut. Dari sisi karakter kepemimpinan, sejatinya tipikal kepemimpinan yang —menyitir Herdiyani— "identik dengan nilai solidaritas, berjiwa sosial, segan untuk korupsi, dan tegas"³ bergayut dengan karakter desentralisasi kita yang memang berintikan penguatan potensi lokal dan perbaikan layanan publik sebagai pemenuhan hak dasar warga dan akses ke keadilan [*access to justice*].

Sejalan pula, karakter kepemimpinan perempuan itu juga didukung oleh faktor suportif lain yang membuat kepemimpinan perempuan bergayut dengan kebutuhan desentralisasi, yakni rekam jejak perjalanan karier dan tingkat pendidikan. Dari 25 pemimpin perempuan di atas, secara umum tercatat gambar bagus profil pendidikan dan jejak karier mereka. Kiprah sebagiannya di dunia profesional, pemilik perusahaan, dosen dan aktivis organisasi adalah modal sosial yang relevan bagi kiprah publik yang lebih strategis. Sebagian lain, dengan tingkat pendidikan yang standar namun memiliki rekam jejak organisasi yang mumpuni tentu merupakan faktor bantuan lain yang menyumbang bagi pembentukan kapasitas kepemimpinan mereka saat

menduduki jabatan eksekutif. Namun, pertanyaan soal mengapa dampak perubahan yang dihasilkan belum spektakuler dan tidak berjangkauan luas tetap perlu menggugah kita mencari jawaban pada dimensi lain. Studi yang dibuat untuk disertasi doktoral dari Partini melihat bahwa struktur pembagian kerja domestik dalam rumah tangga menjadi kendala serius⁴. Di luar itu, hemat saya terdapat sejumlah sebab lain yang melatari masih belum efektifnya pemimpin perempuan menghadirkan perubahan dalam tata kehidupan publik dan pembangunan daerah saat ini.

Pertama, jumlah yang tidak banyak [sejauh ini tercatat hanya 25 pemimpin perempuan yang pernah maupun sedang menjabat sebagai Kepda/Wakepda] tidak cukup membentuk suatu *critical-mass* yang signifikan. Hal ini juga terjadi pada legislatif daerah, meski perjuangan kebijakan afirmatif melalui penetapan kuota 30% perempuan dalam parlemen sudah lama dilakukan⁵. Bandingkan dengan fakta berikut: dari profil anggota DPRD 2009-2014 terlihat bahwa pada lembaga DPRD Propinsi rata-rata keterwakilan perempuan mencapai 16 persen, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya mencapai 12 persen. Semua DPRD Provinsi telah memiliki perwakilan perempuan, kecuali Bali. Sementara untuk DPRD tingkat kabupaten/kota, masih ada 29 daerah yang belum memiliki anggota legislatif perempuan (masih 100 persen laki-laki). Gambaran demikian, termasuk dalam pranata eksekutif yang bahkan proporsinya lebih rendah lagi [25 Kepda/Wakepda dari 542 Daerah], tentu sulit melahirkan suatu kekuatan gerakan perubahan luas dan signifikan.

Kedua, jatuhnya sebagian pemimpin perempuan dalam masalah serupa dengan pemimpin laki-laki, yakni kejahatan korupsi, menunjukkan bahwa integritas pribadi dan lebih-lebih integritas sistem desentralisasi sama-sama menghadirkan perangkap yang sama problematiknya. Kita semua hafal betul, korupsi selalu mengikuti kekuasaan—*power tends to corrupt*. Dalam pemerintahan otokrasi maupun demokratik, peluang itu sama-sama terbuka lebar. Namun, hal fundamental yang membedakan adalah: pada jenis rezim pertama kekuasaan itu berlangsung

sewenang-wenang dan nirkontrol, sementara dalam pemerintahan demokratik terbuka kesempatan untuk mengimbangi pengelolaan kekuasaan lewat instrumen kontrol politik dan administrasi yang ada. Pada tingkat sistem, kontrol semacam itu terutama berupa penguatan sistem integritas untuk menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan sistem integritas yang efektif menjadi prasyarat krusial dalam agenda pendalaman dan pelembagaan demokrasi itu sendiri.

Pada era otonomi hari ini kita menyaksikan begitu cepatnya proses pelumeran otoritas Jakarta dan pemindahan titik berat kekuasaan tersebut ke aras lokal. Pemda memperoleh sekaligus tritunggal sumber daya secara optimal: kewenangan (desentralisasi politik), diskresi kebijakan (desentralisasi administratif), maupun sumber keuangan (desentralisasi fiskal). Namun, kelemahan utama di era desentralisasi ini, kita ternyata abai atau terlambat membangun sistem integritas untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan yang sudah terdesentralisir tersebut. Kita membuka lebar-lebar keran kekuasaan ke daerah (*big-bang decentralization*) tanpa menyadari atau sengaja lupa membangun sistem untuk menjinakkan sekaligus mengefektifkan tata kelola kekuasaan tersebut. Tanpa dilapisi sistem integritas yg menjamin akuntabilitas maka hanya akan terjadi otokrasi baru di level lokal (raja-raja kecil) dan korupsi politik—apakah terjadi pada pemimpin perempuan atau pun laki-laki.

Tanpa sistem integritas yang kuat, uang dan kuasa sulit dikelola secara akuntabel dan efektif, bahkan berbagai sumber daya yang sudah diserahkan ke daerah tadi bisa menjadi pintu terbuka korupsi. Proses konversi atas segala *input* yang masuk ke ranah daerah lalu tidak terkelola secara baik dalam kerangka sistem integritas yang akuntabel dan transparan di mana *output*-nya hanya berupa layanan publik yang buruk dan praktik kejahatan anggaran. Dalam logika ini, korupsi bekerja secara sempurna mengikuti formula Klitgaard (2002): $C=M+D-A$ C (*Corruption* adalah hasil dari M= Monopoli Kewenangan ditambah D= Diskresi Kebijakan, namun minus A=Akuntabilitas) .

Box 2: Korupsi Elit Lokal sepanjang Desentralisasi

Sejak desentralisasi diawali 2001 lalu, desentralisasi korupsi juga tumbuh seiring. Kejahatan kemanusiaan tersebut melibatkan para pemimpin yang pernah dan sedang menjabat dalam lembaga pemerintahan di propinsi maupun kabupaten/kota, baik di legislatif, eksekutif hingga birokrasi terendah di kecamatan dan kelurahan/desa. Sejauh ini sudah tercatat 3.169 anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota tersangkut perkara korupsi. Sementara di ranah eksekutif, setidaknya terdapat 17 Gubernur yang pernah/ sedang menjabat kini berstatus tersangka. Lebih parah lagi, di level kabupaten/kota sebagai pusat kuasa dan sumber daya (titik berat otonomi), paling kurang 331 Kepda/Wakepda berurusan dengan aparat hukum sebagai saksi, tersangka atau terpidana. Di tubuh birokrasi, sebagai mesin pemerintahan yang bekerja langsung di lapangan, hingga hari ini terdapat 1.221 pejabat strategis yang tersangkut masalah serupa.

Ketiga, menytir tesis pokok yang dibangun Jalalzai, konteks politik dan institusionalisasi politik juga membuat kepemimpinan perempuan pada eksekutif negara/nasional tak banyak membawa perubahan. Salah satu hal krusial di dalamnya adalah "*women's familial ties to important political leaders*" justru terbukti telah menyandra perempuan pada keterikatan [belunggu/beban] masa lalu sekaligus secara struktural menghambat gerak maju perubahan itu sendiri. Dalam konteks pemimpin perempuan daerah di Indonesia, hemat saya faktor ini terbilang determinan. Pemimpin lokal tersebut tak lahir di dalam dan seiring transformasi struktur sosial-politik atau lahir di atas medan relasi kuasa (*power relations*) yang berubah. Struktur sosial-politik yang melingkupi otonomi dan kepemimpinan perempuan sejatinya masih lekat interpretasi patriarkial, stereotipe gender, pembagian kerja di ruang privat dan publik yang cenderung mendomestifikasi perempuan dalam ruang peran marginal, dst.

Bahkan lebih luas lagi, desentralisasi itu sendiri—*locus* sekaligus konteks di mana pemimpin perempuan mengoperasionalkan mesin kekuasaan dan kepemimpinannya—justru hingga hari ini belum bisa menjadi instrumen kebijakan yang secara kuat mendesak transformasi struktur politik lokal yang demokratis. Dinasti yang melahirkan kesempatan bagi sebagian pemimpin perempuan jelas berkorelasi

erat dengan oligarki kekuasaan yang bersalin rupa di banyak daerah. Demokrasi, kesejahteraan, dan layanan publik jelas bukan hasil racikan regulasi atau institusi semata tetapi di tingkat lokal bahkan ditentukan dan sebagai hasil langsung dari *power relations*. Bahkan, penguasaan otoritas formal dalam jabatan publik yang didukung jejaring oligarki berarti penguasaan instrumen negara (regulasi, fiskal). Kiblat kebijakan dan alokasi sumber daya/APBD amat sarat *predatory-interest*, membajak arah demokrasi dan berupaya memenangkan secara kasar setiap kepentingan parsial mereka.

Masa depan demokrasi lokal dan peran kepemimpinan perempuan di era desentralisasi ini jelas ditentukan faktor pengaruh aktor politik dan relasi kuasa yang ada. Lemahnya demokrasi dan kepemimpinan yang bermutu di daerah bukan terutama akibat kapasitas pendidikan, pengalaman organisasi, dll {semua itu justru dimiliki secara relatif memadai oleh pemimpin perempuan saat ini} tetapi pengaruh kuat kepentingan material para aktor dominan yang bermain, termasuk para petahana yang "menitipkan" kekuasaannya kepada anak/istri/kerabat dalam lingkaran dinasti yang dikuasainya. Para orang kuat [jawara, *local bossism*, dll] dibelakang layar ini membentuk jaringan patronase, mengkooptasi kebijakan, menyetir alokasi sumber daya politik/ekonomi seturut kalkulasi kepentingan mereka saja. Arena politik lokal, termasuk regenerasi kepemimpinan, dipakai sebagai jalan merevitalisasi kekuasaan dinasti, dan menjadi *locus* baru rekonsolidasi dan reorganisasi kekuasaan, termasuk lewat anak/istri mereka.

Penutup

Dalam arena politik lokal yang belum bertransformasi secara mendasar tersebut, masuknya perempuan dalam sirkulasi kekuasaan [regenerasi kepemimpinan lokal] selalu bisa dilakukan, namun justru menemui kesulitan serius untuk membuktikan kinerjanya ketika sudah berada "di dalam". Mereka dibuat gampang memasuki gelanggang eksekutif atas dasar privelese statusnya sebagai anak atau istri, misalnya, namun setelah berada di dalam justru menemukan situasi penuh perangkap yang membuat mereka tak gampang berbuat banyak bagi pembangunan daerahnya. Tugas utamanya lalu bukan untuk membuktikan luhurnya politik berbasis karakter kepemimpinan khas perempuan atau majunya daerah karena kapasitas pemimpin yang mumpuni berbasis rekam jejak pendidikan dan

sejarah karier yang gemilang tetapi menjadi “representasi” sang pewaris yang sesungguhnya masih mengendalikan arena permainan dan distribusi sumber daya.

Politik “pinjam tangan” demikian lalu seolah terasa efektif dalam diri perempuan. Dalam struktur sosial-politik yang belum berubah—dimana relasi kuasa masih dominan memberat kepada elite lama ketimbang pemimpin faktual yang ada. Dus menggemukkan patriarki! Level intervensi memang tak boleh berhenti pada agenda penguatan kapasitas, redesain kelembagaan atau transfer pengetahuan lewat aneka forum yang mengajarkan cara-cara baru berpemerintahan. Jauh lebih mendasar lagi adalah membangun agenda gerakan perempuan itu sendiri guna mendesak transformasi struktural dalam semesta desentralisasi kita. Inilah kerja politik sesungguhnya. Kerja untuk mentransformasi struktur, sebagai jalan untuk bisa memastikan pemimpin perempuan di eksekutif daerah nantinya bisa menghadirkan perubahan berarti bagi tata kehidupan publik yang setara, adil, demokratis dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Hadiz, Vedi R. “*Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo Institutional Perspective*,” SEARC-CUH, Working Paper No.47, May, 2003 dan “*Indonesia Local Politics: A Site of Resistance to Neo-Liberal Reform*,” SEARC-CUH, Working Paper No.61, March, 2004.
- Harris, John dkk. *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos, 2004.
- Herdiyani, Rena. “Dampak Kehadiran Perempuan di Parlemen dan Eksekutif”, *Jurnal Perempuan No. 63*.
- Jaweng, Robert Endi, “*Desentralisasi Tergerus Korupsi Politik*”, Jakarta IBC, 2013.
- Jaweng, Robert Endi “*Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah*”, dalam buku “Waduk Pluit: Semangat Membangun Jakarta Baru,” Penerbit Kompas, 2014.
- Jalalzai, Farida. “*Women Political Leaders: Past and Present*”, *Women & Politics*, Vol. 26 (3/4) 2004 maupun “*Women Rule: Shattering the Executive Glass Ceiling*”, *Politics & Gender*, 4 (2008).
- Kementerian PPN/BAPPENAS, “*Pembangunan Kesetaraan Gender: Background Study RPJMN III [2015-2019]*”, Jakarta: Bappenas, 2014.
- Partini, “*Bias Gender dalam Birokrasi*,” Yogyakarta: Tiara Wacana, Edisi Kedua, April 2013.
- Smith, Brian. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen and Unwin, London, 1985.
- Umaimah Wahid, “*Risalah Politik Perempuan*”, Tangerang, Banten: Empat Pena Publishing, 2014.
- Zuhro, R. Siti (Ed). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Ombak, 2009.
- Zoelva, Hamdan dalam Kata Pengantar untuk buku Umaimah Wahid, “*Risalah Politik Perempuan*”, Tangerang, Banten: Empat Pena Publishing, 2014.

Catatan Belakang

1. Artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada kepemimpinan perempuan di ranah eksekutif [Kepala/Wakil Kepala Daerah]. Atas dasar alasan-alasan teknis dan substantif terkait dampak pengaruhnya dalam tata pemerintahan daerah, keterwakilan perempuan di ranah legislatif [DPRD] dan kepemimpinan dalam birokrasi [Kepala Dinas/Badan] tidak dibahas atau hanya disinggung sepintas dalam dimensi keterkaitannya dengan isu spesifik yang menyiratkan peran/pengaruh penting mereka di kedua ranah tersebut.
2. Dalam kasus-kasus terbatas memang terdapat pemimpin perempuan yang membuka jalan bagi lahirnya pemimpin perempuan berikutnya [Ratu Atut di Banten dan Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan] namun mengingat karakter dinasti yang melekat di dalamnya tentu sulit untuk disebut sebagai regenerasi politik dalam artian normal.
3. Lihat Rena Herdiyani, “*Dampak Kehadiran Perempuan di Parlemen dan Eksekutif*”, *Jurnal Perempuan No.63*.
4. Partini, “*Bias Gender dalam Birokrasi*,” Yogyakarta: Tiara Wacana, Edisi Kedua, April 2013.
5. Soal kuota ini sendiri tentu tidak bisa dibaca sebagai fenomena terpisah. Efektifitasnya sulit mewujudkan optimal sejauh ini lantaran berbagai sebab. Akar soal, antara lain, terkait sifatnya yang tidak *mandatory* atau bahkan gampang dimanipulasi elite parpol, pembelajaran sistem pemilu daftar terbuka dengan suara terbanyak yang menciptakan medan kompetisi tak setara antara laki-laki dan perempuan, serta sumber daya dan jumlah perempuan sendiri yang berminat terlibat dalam politik praktis memang masih belum memadai. Hamdan Zoelva dalam Kata Pengantar untuk buku Umaimah Wahid, “*Risalah Politik Perempuan*”, Tangerang, Banten: Empat Pena Publishing, 2014.
6. Robert Endi Jaweng, “*Desentralisasi Tergerus Korupsi Politik*”, Jakarta IBC, 2013.
7. Farida Jalalzai, “*Women Political Leaders: Past and Present*”, *Women & Politics*, Vol. 26 (3/4) 2004, pp.85-108 maupun “*Women Rule: Shattering the Executive Glass Ceiling*”, *Politics & Gender*, 4 (2008), 205–231.
8. Vedi R. Hadiz “*Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo Institutional Perspective*,” SEARC-CUH, Working Paper No.47, May, 2003 dan “*Indonesia Local Politics: A Site of Resistance to Neo-Liberal Reform*,” SEARC-CUH, Working Paper No.61, March, 2004.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics*..... 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menakutkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics*..... 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'être of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance*..... 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings..... 333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

